

Hasil Penelitian

PERAN STRATEGIS MASYARAKAT SADAR WISATA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA (STUDI EMPIRIS: DESA UJUNG PANDARAN KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)

((THE STRATEGIC ROLE OF COMMUNITY AWARENESS TO IMPROVE TOURISM CREATIVE ECONOMY (EMPIRICAL STUDY: UJUNG PANDARAN VILLAGE, TELUK SAMPIT DISTRICT, KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY))

Maria Christina Yuli Pratiwi

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
Jl. Jenderal Sudirman Km. 5,5 Sampit, Kalimantan Tengah - Indonesia
email: mcy.pratiwi@yahoo.co.id

Diterima: 28 November 2019; Direvisi: 29 Januari 2020; Disetujui: 04 Maret 2020

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara sumberdaya alam untuk perbaikan ekonomi pedesaan menjadi salah satu pilihan strategis mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya Desa Ujung Pandaran sebagai daerah tujuan wisata. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat lokal dalam mendukung dan mengembangkan pariwisata, serta pelaksanaan *community based tourism* di Desa Ujung Pandaran, dan mengidentifikasi potensi pariwisata dan industri kreatif di Desa Ujung Pandaran. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa peran masyarakat Desa Ujung Pandaran baik secara perorangan maupun kelompok (Pokdarwis Garda Pesisir) bersifat aktif walaupun belum sepenuhnya. Partisipasi masyarakat lokal tergolong dalam partisipasi citizen power, yaitu partisipasi masyarakat yang ideal, yang mana masyarakat memiliki keleluasaan dalam berpartisipasi menentukan masa depan daerahnya dan mampu mengontrol kinerja pemerintahan daerah. Pelaksanaan CBT di Desa Ujung Pandaran belum terwujud. Masyarakat Desa Ujung Pandaran tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan musyawarah penentuan kebijakan pariwisata. Desa Ujung Pandaran terkenal akan hasil perikanan laut dan jumlah industri kreatif atau UMKM cukup banyak, seperti usaha pengolahan kepiting dan rajungan, pembuatan ikan asin, terasi dan kerupuk dari telur ikan, serta kerajinan kulit kerang. Rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Desa Wisata Ujung Pandaran berbasis ekonomi kreatif adalah melibatkan pelaku usaha industri kreatif dalam mengelola dan pelaksanaan kegiatan wisata, serta penguatan kelembagaan melalui penguatan kapasitas pada kelompok-kelompok yang peduli akan pariwisata. Selain itu, untuk mempromosikan obyek wisata di Desa Ujung Pandaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pelaku usaha (travel dan hotel) dan masyarakat lokal, meningkatkan promosi melalui media sosial, serta yang paling penting adalah memperbaiki dan membenahi sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Kata kunci: pariwisata, desa Ujung Pandaran, masyarakat, sadar wisata, Pokdarwis, ekonomi kreatif

ABSTRACT

Community empowerment through awareness of the importance of protecting and maintaining natural resources to improve the rural economy is one of the strategic way to realize the East Kotawaringin Regency especially Ujung Pandaran Village as a tourist destination. This study aims to determine and analyze the role of the Ujung Pandaran Village local community in supporting and developing tourism activities also the implementation of community based tourism in Ujung

Pandaran Village and to identify the tourism potency and creative industries in Ujung Pandaran Village. Using quantitative descriptive methods with data collection through interviews, questionnaires, observation, and documentation, the result of study finds the role of Ujung Pandaran Village community both individually and in groups (Pokdarwis Garda Pesisir) is active, although not yet fully. Participation of local community is classified as citizen power participation, an ideal community participation which the community has the discretion in participating of determining the future of their village and be able to control the performance of regional government. The implementation of CBT in Ujung Pandaran Village has not been realized. The people of Ujung Pandaran Village do not have the power to participate actively in the decision making process and deliberations on determining tourism policies. The tourism potency of Ujung Pandaran Village is very large to be developed. Ujung Pandaran Village is famous with fishery products and the number of UMKM in this village is quite numerous, such as crab and small crab processing, making salted fish, shrimp paste and cracker from fish egg, also shellfish handicraft. The policy references are recommended for the Regional Government in developing Ujung Pandaran Village based on the creative economy as follows: involve creative industry businesses in managing and implementing tourism activities; also strengthening institutional through capacity building for groups who concern with tourism. In addition, to promote tourism in Ujung Pandaran Village, the Regional Government develop cooperation with business society (travel and hotels) and local communities, improve promotion through social media, also the most important are repair and fix the facilities and infrastructure of supporting tourism.

Keywords: *tourism, Ujung Pandaran village, community, tourist aware, Pokdarwis, creative economy*

PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki peran penting dalam menambah sumber utama pendapatan Negara dan investasi ekonomi dimasa depan. Pariwisata tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, pendapatan tambahan, peluang kesempatan berusaha dan lapangan kerja, namun juga mampu mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional. Data BPS Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 10,87 juta kunjungan atau naik 2,67 persen dibanding jumlah kunjungan wisman Tahun 2018 yang berjumlah 10,58 juta kunjungan. Meningkatnya jumlah kunjungan ini seiring masifnya program pemerintah dalam mencapai target kunjungan wisman sebanyak 18 juta orang pada Tahun 2019.

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Tengah, membuat kabupaten ini menjadi tempat strategis dalam menggaet wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Data Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 menunjukan bahwa kontribusi pajak dari sektor pariwisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 5,07 persen atau meningkat 9,55 persen dari tahun sebelumnya. Total PAD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 mencapai Rp 200.129.417.178,89 dan kontribusi dari retribusi tempat wisata, pajak hotel, restoran dan hiburan mencapai Rp 10.148.592.567,-. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018 yang jumlahnya menurun sebesar 29,57 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tingginya jumlah kunjungan harus diimbangi dengan kualitas layanan (Kotler, Bowen & Makens, 2010) dalam Karim, et.al (2017). Untuk mencapai kondisi kualitas pelayanan yang baik terutama dalam menunjang pengembangan pariwisata, diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Salah satu konsep pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal adalah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Prinsip dasar konsep ini adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat.

Studi tentang pariwisata berbasis masyarakat dan peran masyarakat sadar wisata telah banyak dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Peneliti dari luar negeri, Kontogeorgopoulos, et.al., (2013) dari University of Puget Sound, Tacoma, USA melakukan penelitian sejenis terhadap 30 responden dengan menggunakan metode interview semi struktur. Diperoleh bahwa kondisi geografis, dukungan eksternal, dan transformasi kepemimpinan di Desa Mae Kampong, Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara merupakan faktor paling penting keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat.

Tolkach dan King (2015) dari School of Hotel and Tourism Management Hong Kong melakukan penelitian dengan judul *Strengthening Community-Based Tourism in A New Resource-Based Island Nation: Why and How?*. Penelitian dilakukan di Timor Leste dengan menggunakan metode interview dan diperoleh bahwa jaringan pariwisata berbasis masyarakat di Timor Leste dapat mendukung pengembangan pariwisata, membantu swasta dalam menghadapi tantangan kurangnya

pengetahuan, pendanaan dan pemasaran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Sedangkan peneliti dari dalam negeri, Rahayu, et.al., (2016) dari Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metode eksplorasi, implementasi dan diseminasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan upaya pengembangan *Community Based Tourism* melalui Program Pengembangan Destinasi Wisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Kemitraan. Jenis pariwisata yang potensial dikembangkan sebagai pariwisata berbasis masyarakat meliputi wisata alam, agro, religi, pendidikan, budaya, kerajinan, dan kuliner.

Keterkaitan pariwisata dengan ekonomi kreatif sebagaimana diungkapkan oleh Ooi (2006) dalam Suparwoko (2015) adalah pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua hal yang saling berkaitan dan bersinergi jika dikelola dengan baik. Pariwisata berbasis ekonomi kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan cadangan sumberdaya yang tidak hanya terbarukan, namun tidak terbatas, seperti ide, gagasan dan kreativitas. Proses kreativitas yang menciptakan produk dan jasa kreatif bernilai ekonomis seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Konektivitas antara ekonomi kreatif dan pariwisata dapat berbentuk outlet penjualan yang terletak di daerah wisata. Hasil produk inovatif atau kerajinan berupa souvenir memberikan kenangan atau memorabilia bagi para wisatawan yang berkunjung dan membuka peluang wisatawan untuk berkunjung kembali. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata di Indonesia belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Ekonomi kreatif dan sektor pariwisata pada sebagian besar kota-kota di Indonesia masih berjalan secara terpisah. Salah satu contoh adalah Pasar Gabusan di Kota Yogyakarta dan Pasar Blauran di Kota Palangkaraya. Kedua pasar ini merupakan salah satu contoh tempat ekonomi kreatif yang berada terlalu jauh dari tempat wisata dan terkesan kurang dipromosikan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kreatif pariwisata dilakukan oleh Shahraki serta Nurchayati dan Ratnawati. Shahraki (2018) dari Departemen Arkeologi, Swedia melakukan penelitian tentang pariwisata dalam skala global dan industri kerajinan lokal di Shiraz, Iran dengan menggunakan metode statistik (uji statistik non-parametrik). Berdasarkan skor tes

Friedman diperoleh bahwa terdapat 12 variabel penting dalam mengembangkan industri kreatif pariwisata di Shiraz. Tiga unsur paling penting dari 12 variabel tersebut adalah melakukan pemasaran ilmiah secara nasional dan internasional (83,7), meningkatkan partisipasi wisatawan dalam proses produksi kerajinan tangan (83,4), dan partisipasi wisatawan dalam kegiatan masyarakat lokal (82).

Penelitian Nurchayati dan Ratnawati (2016) yang berjudul Strategi Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Penggerak Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap pelaku industri kreatif secara *snowball* dengan menggunakan alat analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kreatif dan destinasi wisata. Industri kreatif pada subsektor kerajinan memberikan sumbangan terbesar dalam bentuk devisa dan penyerapan tenaga kerja.

Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif membutuhkan keterlibatan masyarakat atau komunitas yang berkualitas dan unsur birokrasi dengan pola entrepreneurship (kewirausahaan). Menurut Noviyanti (2017), ekonomi kreatif menjadikan SDM sebagai modal utama dalam sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide dan pemikiran. Namun keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif tidak hanya berupa ide dan kreativitas yang tinggi, namun masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata.

Masyarakat yang sadar akan wisata adalah masyarakat yang dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan). Salah satu bentuk perwujudan masyarakat sadar wisata atau lembaga swadaya masyarakat adalah Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang pariwisata, meningkatkan mutu produk wisata dan ekonomi kreatif pariwisata dalam rangka daya saing daerah, serta berperan sebagai penggerak terwujudnya Sapta Pesona.

Penelitian tentang peran Pokdarwis yang dilakukan Suryawan dan Malik. Suryawan (2016) dengan judul Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendang Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis Sendang Arum berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata di Desa Wisata Tlahap. Malik (2017) melakukan penelitian serupa di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rajabasa sudah pada tahap pemanfaatan hasil. Faktor pendukung keterlibatan Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata adalah faktor sumberdaya alam, sedangkan faktor penghambat terdiri dari lemahnya pemahaman pokdarwis, kurangnya perhatian pemerintah, keterbatasan dana, dan lemahnya kesadaran masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal dan diadopsi dalam bentuk paket wisata adalah desa wisata. Di Indonesia, terdapat beberapa desa wisata yang bermunculan namun hanya sebagian kecil yang berhasil. Kelemahan terbesar dari keberadaan desa wisata adalah minimnya sarana infrastruktur dan tidak adanya link dengan industri kreatif untuk produksi souvenir serta kurangnya kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya pariwisata dan upaya promosi dari Pemerintah Daerah.

Salah satu desa wisata yang belum berhasil adalah Desa Wisata Jati Luwih, Tabanan, Bali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et.,al pada Tahun 2013 diperoleh bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah dan golongan menengah keatas masih sangat mendominasi dalam pengelolaan sumber daya pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Wearing (2001) dalam Dewi, et.,al (2013) yang menyatakan bahwa masyarakat lokal memiliki kedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et.,al (2013) dan Malik (2017) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. Kondisi yang hampir sama terjadi di Desa Wisata Ujung Pandaran. Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif di desa wisata ini belum berjalan dengan baik. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung pariwisata Desa Wisata Ujung Pandaran belum memadai, seperti akses jalan menuju lokasi wisata dan tidak adanya toko souvenir di lokasi wisata. Kondisi fasilitas penunjang obyek wisata andalan Pantai Ujung Pandaran cukup lengkap

namun dengan kondisi seadanya. Akibat abrasi yang melanda pantai sejak Tahun 2015 hingga saat ini, fasilitas yang ada lokasi wisata Pantai Ujung Pandaran seperti gazebo, penginapan dan balai pertemuan menjadi rusak berat. Hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Ujung Pandaran.

Selain itu, tidak adanya tempat penjualan souvenir khas daerah di lokasi wisata Pantai Ujung Pandaran membuat para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ujung Pandaran hanya sekedar datang melihat keindahan pantai dan pulang tanpa membawa sesuatu untuk dikenang. Berdasarkan keadaan tersebut, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan: 1) peran masyarakat lokal dalam mendukung dan mengembangkan pariwisata di Desa Ujung Pandaran; 2) pelaksanaan *community based tourism* atau CBT di Desa Ujung Pandaran; dan, 3) potensi wisata dan industri kreatif di Desa Ujung Pandaran.

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat lokal dapat lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mengembangkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Desa Ujung Pandaran. Melalui industri kreatif, masyarakat lokal diharapkan memiliki ide dan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan produk-produk kreatif dan memperoleh peluang untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti toko souvenir sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat lokal menjadi meningkat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit khususnya di lokasi wisata Pantai Ujung Pandaran dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Subyek atau responden dipilih menggunakan metode purposive sampling, sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari pemerintah, diwakili oleh Camat Teluk Sampit dan Kepala Desa Ujung Pandaran, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Ketua Pokdarwis Garda Pesisir, tokoh masyarakat dan tokoh adat, pengunjung atau wisatawan, pelaku usaha (warung makan dan villa), pengrajin industri kreatif, serta masyarakat lokal.

Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan alat instrumen berupa kuisisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan literatur serta laporan yang relevan. Teknik pengolahan data

kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, sedangkan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan analisis SWOT (*Strong, Weakness, Opportunity, dan Threat*).

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain (Damanik dan Weber, 2006 dalam Satria, 2009). Penyusunan tabel frekuensi memuat jumlah frekuensi dan persentase untuk setiap kategori/karakteristik pernyataan responden (Supangat, 2008 dalam Kuswanda, 2019). Hasil tabel frekuensi dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan analisis deskriptif.

Tabel 1. Klasifikasi Penilaian Partisipasi Masyarakat

No.	Kategori	Range
1.	Rendah	0 – 33,33
2.	Sedang	33,34 – 66,67
3.	Tinggi	66,68 – 100

Sumber: Arstein (1969)

Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat menggunakan acuan pada tingkat partisipasi Arnstein yang dibagi dalam 3 kelompok dengan nilai 0 sampai dengan 100 seperti pada Tabel 1, yaitu kategori rendah (0-33,33), sedang (33,34-

66,67) dan tinggi (66,68-100). Tingkat partisipasi masyarakat diukur berdasarkan persentase yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden masyarakat lokal dan pengunjung yang berjumlah 12 orang dengan mengacu pada empat indikator, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil atau implementasi serta evaluasi dan pengawasan dan jumlah instrumen sebanyak 18.

Tingkat partisipasi masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Arnstein (1969) mendefinisikan partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi yang mana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Menurut Arnstein (1969) dalam Cahya (2016), terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat seperti pada Tabel 2, yaitu: tidak partisipatif (*non participation*); semu atau tidak serius (*tokenism*); dan, kekuatan masyarakat (*citizen power*).

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan, namun juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan, serta menikmati hasil pelaksanaan kegiatan. Tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Tabel 2. Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein

8	<i>Citizen Control</i> (kendali masyarakat)	
7	<i>Delegated Power</i> (kekuatan yang didelegasi)	<i>Citizen Power</i> (kekuatan masyarakat)
6	<i>Partnership</i> (kemitraan)	
5	<i>Placation</i> (penentraman)	
4	<i>Consultation</i> (konsultasi)	<i>Tokenism</i> (semu atau tidak serius)
3	<i>Informing</i> (pemberian informasi)	
2	<i>Therapy</i> (terapi)	<i>Non Participation</i> (tidak partisipatif)
1	<i>Manipulation</i> (manipulasi)	

Sumber: Arstein (1969)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki posisi sangat strategis dan sebagai pintu gerbang Kalimantan Tengah. Sektor pariwisata di kabupaten ini berpotensi besar untuk dikembangkan karena didukung oleh potensi wisata yang luar biasa. Obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur

cukup lengkap, dari wisata alam, buatan, pendidikan, religi hingga budaya. Beragamnya jenis obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjadi potensi dan investasi ekonomi yang besar dimasa yang akan datang, baik itu bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat lokal. Untuk itu, dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat agar selalu tercipta kesinambungan antarstakeholder.

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Kab. Kotim Tahun 2012 s/d 2018

Tahun	Jumlah Wisatawan Domestik (Orang)	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)	Total Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah Pendapatan (Rp)
2012	29.470	0	29.470	NA
2013	30.000	4	30.004	NA
2014	60.450	6	60.456	NA
2015	61.070	0	61.070	NA
2016	91.300	21	91.321	77.284.000
2017	126.574	41	126.615	102.558.000
2018	87.972	1.206	89.178	73.684.000

Sumber: Disbudpar Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim (2019)

Tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Timur berfluktuatif baik pada kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 (lihat Tabel 3), menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan selama Tahun 2012-2017. Namun pada Tahun 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung menurun sebesar 29,57 persen dibanding Tahun 2017. Hal ini kemungkinan disebabkan karena bencana alam abrasi yang terus menggerus obyek wisata andalan Pantai Ujung Pandaran sehingga badan jalan menuju objek wisata menjadi rusak dan bibir pantai terkikis. Pantai yang sebelumnya lebar kini kondisinya semakin mengecil dan kurang menarik sehingga banyak wisatawan yang beralih berkunjung ke lokasi wisata yang dikelola oleh swasta karena kondisi pantainya lebih indah dan terdapat berbagai wahana permainan. Desa Ujung Pandaran merupakan salah satu daerah pesisir di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terletak di Kecamatan Teluk Sampit.

Secara geografis, desa Ujung Pandaran merupakan wilayah strategis sebagai daerah yang memiliki kelengkapan sumberdaya berbasis kepariwisataan yang mendekati seluruh sumberdaya kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Potensi wisata luar biasa yang dimiliki Desa Ujung Pandaran membuat desa ini ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/104/HUK-DISBUDPAR/VI/2014. Desa ini layak disebut sebagai desa wisata sebagaimana diungkapkan oleh Prakoso (2008) dalam Untari (2018) karena memiliki: wisata

unggulan yang langka atau tidak dapat ditemui di daerah lain, yaitu obyek wisata Pantai Ujung Pandaran; wisata alamiah yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia, yaitu wisata budaya ritual adat Simah Laut; keunikan, yaitu wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding obyek wisata lain, seperti Pantai Kalap, Sumur Bajao, Air Terjun Kalap Gadur (air terjun merah), serta keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata, yaitu keberadaan Pokdarwis Garda Pesisir.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh bahwa Desa Ujung Pandaran memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Adapun potensi wisata di Desa Ujung Pandaran dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT yang disajikan pada Tabel 4.

Kegiatan pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya melibatkan peran dari seluruh stakeholder, meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing-masing (Cohen, 1972 dalam Karim, et.,al, 2017). Peran serta masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan terutama dalam menciptakan sadar wisata. Peran masyarakat Desa Ujung Pandaran yang sadar akan wisata dapat dilihat dari partisipasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok yang diukur berdasarkan empat indikator, yaitu: peran dalam perencanaan; pelaksanaan; implementasi; serta, evaluasi dan pengawasan.

Peran masyarakat secara perorangan dilihat dari partisipasi masyarakat secara pribadi terhadap kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Ujung Pandaran, sedangkan peran masyarakat secara kelompok, dapat dilihat dari peran Pokdarwis Garda Pesisir.

Tabel 4. Analisis SWOT Potensi Pariwisata Desa Ujung Pandaran

Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunity)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi wisata di Desa Ujung Pandaran cukup lengkap, dari wisata alam, wisata pendidikan, wisata religi hingga wisata budaya. Hal ini menjadi keunggulan dan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. ▪ Kehidupan masyarakat nelayan Desa Ujung Pandaran yang unik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. ▪ Pantai Ujung Pandaran memiliki keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Terkenal sebagai pantai yang landai, hamparan pasir putih yang luas, deburan ombak yang cukup besar, dan kekayaan biota laut khas pantai. ▪ Desa Ujung Pandaran terkenal akan hasil perikanan laut berupa olahan makanan laut, seperti ikan asin, kerupuk ikan pipih, kepiting dan rajungan. ▪ Ekosistem mangrove di kawasan Pantai Ujung Pandaran mulai tertata dengan baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat. ▪ Sering menjadi tempat tujuan berkemah oleh siswa sekolah, organisasi pramuka dan wartawan, seperti Kemah Elly, Kemah Besar Pramuka, dan Kemah Jurnalistik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi obyek wisata lain yang masih alami dan belum tersentuh manusia, seperti Pantai Kalap, Sumur Bajao, Air Terjun Kalap Gadur, Galangan Kapal Batu 3 Kalap Seban, dan Petapaan Kalap Seban. ▪ Terdapat obyek wisata hutan mangrove, yang dapat menjadi pilihan tempat ekowisata menarik di Kabupaten Kotawaringin Timur. ▪ Terdapat warung makan dan penginapan atau <i>villa</i> milik masyarakat di lokasi destinasi wisata dengan harga yang terjangkau dan kebersihan yang terjaga baik. ▪ Adanya transportasi umum menuju ke lokasi obyek wisata Pantai Ujung Pandaran, yaitu Bis Damri. ▪ Jumlah industri kreatif atau Usaha Mikro Kredit Menengah (UMKM) cukup banyak, seperti usaha pengolahan kepiting dan rajungan, pembuatan ikan asin, terasi dan kerupuk dari telur ikan, serta kerajinan kulit kerang. ▪ Pemerintah Daerah saat ini sedang membangun fasilitas pendukung pariwisata seperti dermaga wisata, pertokoan pusat kuliner, ruang terbuka hijau, dan bundaran. ▪ Pembangunan tanggul juga dilakukan untuk mengatasi abrasi yang terus menggerus pantai dan menjadi ancaman besar bagi Pantai Ujung Pandaran. ▪ Adanya dukungan dari masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengembangan Desa Wisata Ujung Pandaran. ▪ Adanya partisipasi masyarakat lokal baik secara perorangan maupun kelompok dalam menjaga kelestarian alam melalui kegiatan penanaman mangrove.
Kelemahan (Weakness)	Ancaman (Threat)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi jalan utama menuju Desa Ujung Pandaran rusak parah, namun kondisi jalan menuju lokasi obyek wisata Pantai Ujung Pandaran cukup baik. ▪ Tidak ada penerangan jalan di sepanjang jalan utama menuju Desa Ujung Pandaran ketika malam hari. ▪ Fasilitas pendukung wisata seperti toilet, tempat sampah, dan gazebo kurang memadai. ▪ Layanan internet di kawasan wisata Pantai Ujung Pandaran sangat lambat sehingga para wisatawan mengalami kesulitan dalam mengunggah atau memasang foto dan video di media sosial pribadi. ▪ Tidak ada tempat penjualan souvenir di lokasi obyek wisata Pantai Ujung Pandaran. Wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi garis Pantai Ujung Pandaran yang semakin terkikis akibat abrasi dan terancam tenggelam akibat kuatnya hantaman gelombang Laut Jawa. ▪ Abrasi membuat jalan menuju lokasi wisata kubah ulama Syeh H Abdul Hamid menjadi terputus. ▪ Pariwisata menuntut kondisi infrastruktur yang baik dan fasilitas pendukung pariwisata yang memadai. ▪ Keberadaan Pantai Satiruk di Desa Satiruk Kecamatan Pulau Hanaut yang masih sangat alami dengan pemandangan yang sangat indah dan relatif aman dari abrasi.

hanya sekedar datang ke pantai untuk menikmati keindahan pantai tanpa membawa sesuatu untuk dikenang.

- Belum ada pertunjukkan dan atraksi budaya yang ditampilkan secara periodik.
- Tidak ada fasilitas ATM, pos kesehatan dan pos keamanan di lokasi obyek wisata Pantai Ujung Pandaran.
- Kualitas SDM yang memahami pariwisata sangat rendah.
- Kurangnya promosi obyek wisata Desa Wisata Ujung Pandaran.
- Kurangnya kesadaran para wisatawan dalam membuang sampah di lokasi wisata Pantai Ujung Pandaran.

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Ujung Pandaran berdasarkan indikator implementasi, memiliki persentase sedang, yaitu sebesar 58,33 persen. Parameter partisipasi masyarakat dalam indikator implementasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata, seperti sebagai pengelola penginapan dan warung makan, karyawan penginapan, dan pengelola wahana wisata. Hasil wawancara terhadap masyarakat lokal diperoleh bahwa keterlibatan masyarakat Desa Ujung Pandaran dalam memanfaatkan peluang usaha terlihat minim. Perwujudan partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata di Desa Ujung Pandaran memang ada, namun bentuknya lebih pada pengelolaan usaha-usaha berskala kecil, seperti usaha warung makan dan pembuatan *souvenir*.

Partisipasi masyarakat dari luar Desa Ujung Pandaran justru lebih besar bahkan terkesan memonopoli usaha-usaha berskala besar. Salah satunya terlihat dari lima penginapan atau *villa*

yang terdapat di Desa Ujung Pandaran, hanya satu *villa* yang dikelola oleh masyarakat lokal. Hal ini tidak terlepas karena peluang usaha *villa* memerlukan modal yang sangat besar, risiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Sedangkan masyarakat Desa Ujung Pandaran memiliki keterbatasan modal dan kompetensi bisnis yang rendah sehingga masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar Desa Ujung Pandaran.

Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih (Dewi, *et.al*, 2013). Partisipasi masyarakat luar Desa Jatiluwih memonopoli usaha berskala besar, yaitu dari tujuh fasilitas wisata (4 buah sarana akomodasi dan 3 buah restoran), lima di antaranya dikelola oleh orang asing dan hanya dua buah yang dikelola oleh masyarakat lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata di Indonesia belum sepenuhnya bermanfaat ekonomis bagi masyarakat lokal.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat Ujung Pandaran dalam Upaya Pengembangan Pariwisata

No.	Tolok Ukur	Jumlah Responden	Persentase (%)
Perencanaan			
1.	Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan musyawarah penentuan kebijakan pariwisata	5	41,67
2.	Masyarakat berinisiatif dalam mengajukan pendapat terhadap kebijakan pariwisata	10	83,33
	Rata-rata		62,50
Pelaksanaan			
3.	Terdapat atraksi wisata yang dilakukan oleh masyarakat lokal	7	58,33
4.	Terdapat fasilitas pendukung wisata seperti <i>banana boat</i> , kano, perahu karet dan penginapan atau <i>villa</i>	9	75,00
5.	Masyarakat lokal sebagai pelaku wisata berperan memberi informasi kepada wisatawan	10	83,33

6.	Masyarakat menyajikan <i>souvenir</i> khas wisata yang menarik, unik dan khas serta mudah dibawa	5	41,67
7.	Terdapat masyarakat yang menjual makanan dan minuman dengan harga yang wajar dilingkungan wisata dan higienis	9	75,00
8.	Masyarakat lokal berperan aktif dalam menjaga dan memelihara keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan daerah wisata	10	83,33
9.	Masyarakat menunjukkan keramahan dan rasa bersahabat terhadap wisatawan	10	83,33
10.	Masyarakat selalu siap membantu, menolong dan melindungi wisatawan	8	66,67
11.	Masyarakat menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan	7	58,33
12.	Masyarakat ikut serta mempromosikan obyek wisata	5	41,67
13.	Masyarakat menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal	9	75,00
	Rata-rata		67,42
Implementasi			
14.	Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal	10	83,33
15.	Penghasilan masyarakat sesuai UMK	7	58,33
16.	Tingkat kesenjangan sosial menurun	4	33,33
	Rata-rata		58,33
Evaluasi dan Pengawasan			
17.	Masyarakat diminta untuk menilai kebijakan pembangunan pariwisata dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.	8	66,67
18.	Masyarakat berinisiatif memberikan penilaian, kritik, dan saran terhadap kebijakan pembangunan pariwisata	10	83,33
	Rata-rata		75,00

Sumber: Hasil penelitian (2018)

Tabel 6. Nilai Rata Rata Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat Ujung Pandaran

Indikator	Rata-rata Indikator (%)
Perencanaan	62,50
Pelaksanaan	67,42
Implementasi	58,33
Evaluasi dan Pengawasan	75,00
Rata-rata	68,75

Sumber: Data penelitian diolah (2019)

Pada Tabel 6 terlihat bahwa indikator tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki persentase paling tinggi adalah tahap evaluasi dan pengawasan, sebesar yaitu 75,00 persen. Masyarakat Desa Ujung Pandaran lebih memilih berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif untuk mencegah tindakan-tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan desa dan wisatawan yang berkunjung seperti mengawasi kehidupan anak muda yang mabuk-mabukan di sekitar lokasi wisata.

Berdasarkan Tabel 6, rata-rata partisipasi masyarakat Ujung Pandaran dalam

pengembangan pariwisata ditinjau dari partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan evaluasi pariwisata tergolong dalam kategori tinggi. Menurut teori Arstein, partisipasi masyarakat Ujung Pandaran tersebut termasuk dalam kategori *citizen power*, yaitu partisipasi masyarakat yang ideal. Dalam kategori *citizen power*, masyarakat bersama *stakeholder* secara bersama-sama bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan (*partnership*), masyarakat memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan (*delegated*

power), dan masyarakat mampu mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (citizen control). Dalam hal keaktifan masyarakat, hasil penelitian menemukan bahwa kehadiran warga Desa Ujung Pandaran dalam pertemuan tingkat desa dan kecamatan cukup antusias. Walaupun banyak masyarakat yang hadir dalam setiap pertemuan dan memiliki inisiatif yang cukup besar dalam mengajukan pendapat terhadap kebijakan pariwisata, namun mayoritas masyarakat Desa Ujung Pandaran tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan.

Peran Pemerintah Daerah masih sangat dominan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Ujung Pandaran, salah satunya adalah menyediakan sarana prasarana obyek wisata, seperti pembuatan gazebo dan balai pertemuan di lokasi wisata Pantai Ujung Pandaran, serta memberi peluang kepada para investor untuk membangun villa di Desa Ujung Pandaran. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora dan Sinaga (2016).

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah masih sangat dominan. Perannya sebagai fasilitator terlihat pada penyediaan sarana prasarana obyek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha wisata berupa kebijakan dan peraturan yang melindungi serta menguntungkan pihak investor dan pengusaha wisata, mempromosikan obyek wisata, dan memfasilitasi kelompok masyarakat sadar wisata dalam mendapatkan dana *stimulant*.

Partisipasi masyarakat Desa Ujung Pandaran secara perseorangan tidak hanya diukur berdasarkan empat indikator, namun juga dilihat dari hasil wawancara terhadap pengunjung. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujung Pandaran termasuk dalam masyarakat sadar wisata. Sikap dan perilaku masyarakat lokal telah mencerminkan unsur-unsur Sapta Pesona sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Pada Tabel 7 terlihat bahwa persentase enam unsur Sapta Pesona yang terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan ramah, mencapai lebih dari 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Ujung Pandaran cukup aktif dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di Desa Ujung Pandaran. Namun keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif tidak hanya diukur dari tingkat kesadaran masyarakat saja, dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi menciptakan produk-produk kreatif serta memasarkannya. Kegiatan ini dapat

memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti toko *souvenir* dan secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Lutpi (2016), bahwa peran masyarakat yang semakin aktif dalam aktivitas pariwisata akan memberikan kesempatan kerja yang semakin terbuka sehingga pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat.

Tabel 7. Sikap dan Perilaku Masyarakat Ujung Pandaran Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap Pengunjung

Unsur-unsur Sapta Pesona	Persentase (%)
Aman	95,23
Tertib	83,30
Bersih	86,11
Sejuk	85,26
Indah	90,78
Ramah	87,35
Kenangan	77,78

Sumber: Data penelitian diolah (2019)

Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT) sangat erat kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat lokal. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan kepariwisataan karena sumberdaya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas masyarakat merupakan unsur penggerak pariwisata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iorio dan Corsale (2014) dari Rumania. Menggunakan metode *interview*, observasi dan studi literatur, diperoleh bahwa jaringan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Viscri, Rumania harus lebih diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CBT di Desa Ujung Pandaran belum terwujud. Hal ini terlihat dari kecilnya persentase partisipasi masyarakat Desa Ujung Pandaran dalam proses pengambilan keputusan, ikut serta mempromosikan obyek wisata, dan keuntungan yang diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat Desa Ujung Pandaran tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan musyawarah penentuan kebijakan pariwisata. Sehingga tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunaryo (2013) belum tercapai di Desa Ujung Pandaran.

Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis merupakan perwujudan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. Saat ini Desa Ujung Pandaran telah memiliki Pokdarwis Garda Pesisir yang dibentuk pada Tahun 2018. Pokdarwis Garda Pesisir beranggotakan masyarakat Desa Ujung Pandaran yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab akan potensi pariwisata di Desa Ujung Pandaran. Program-program kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Garda Pesisir antara lain melakukan program penyadaran berupa penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat lokal (khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan obyek wisata) akan pentingnya peran dan tanggung jawab dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan potensi wisata, menyewakan *banana boat*, kano, dan perahu karet bagi wisatawan, serta melakukan penanaman dan pembibitan mangrove.

Keberadaan Pokdarwis Garda Pesisir membawa dampak positif bagi masyarakat, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru, menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menambah pengalaman bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung kegiatan Pokdarwis dalam memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi pariwisata: pengurus Pokdarwis melakukan pelatihan kepada para anggota untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pariwisata; bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berupa *banana boat*; partisipasi aktif anggota Pokdarwis dan masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan bangunan bersejarah (makam ulama Syeh H Abdul Hamid) dan kearifan lokal ritual adat Simah Laut; serta dukungan penuh dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yaitu: kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memprakarsai pembentukan Pokdarwis dan kurangnya dukungan dari masyarakat lokal. 70 persen responden masyarakat lokal tidak mengetahui keberadaan Pokdarwis Garda Pesisir.

Desa Ujung Pandaran memiliki potensi yang cukup besar dalam industri kreatif. Hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa jumlah industri

kreatif yang terdapat di wilayah ini cukup banyak, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) UMKM terdiri dari 16 industri rumah tangga (IRM), yaitu usaha pembuatan ikan asin, terasi, dan kerupuk dari telur ikan (IRM) serta 4 industri kecil menengah (IKM), yaitu usaha kerajinan kulit kerang, pengolahan kepiting dan rajungan. Industri kreatif di Desa Ujung Pandaran sudah berjalan dengan baik namun pengelolannya belum optimal. Masyarakat lokal membuat dan menjual kerajinan kulit kerang hanya pada saat-saat tertentu, seperti musim liburan dan even-even promosi.

Sedangkan usaha pembuatan ikan asin, terasi, kerupuk serta pengolahan kepiting dan rajungan dilakukan jika bahan baku tersedia yang diperoleh dari hasil tangkapan para nelayan di laut. Tidak setiap hari para nelayan Desa Ujung Pandaran pergi melaut, jika gelombang air laut sedang tinggi maka para nelayan memilih untuk istirahat. Untuk mengisi waktu luang, beberapa nelayan melakukan berbagai aktivitas seperti memperbaiki jaring dan kapal, akibatnya pendapatan masyarakat nelayan menurun. Beberapa nelayan harus mencari pekerjaan di luar desa agar dapat bertahan hidup sambil menunggu kondisi laut bersahabat.

Perangkat Desa Ujung Pandaran telah berusaha mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, agar para nelayan mendapat pelatihan berupa budidaya ikan di tambak dan bimbingan teknis pemanfaatan kulit kerang supaya para nelayan tetap memperoleh penghasilan saat tidak melaut. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat nelayan Desa Ujung Pandaran.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, peran masyarakat Desa Ujung Pandaran dalam mendukung pengembangan pariwisata terlihat dari partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat Ujung Pandaran tergolong dalam kategori citizen power, yaitu partisipasi masyarakat yang ideal walaupun tidak sepenuhnya. Masyarakat Desa Ujung Pandaran bersama stakeholder secara bersama-sama bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan (*partnership*) pengembangan pariwisata di Desa Ujung Pandaran. Masyarakat juga mampu mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (*citizen control*) namun masyarakat tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan (*delegated power*). Masyarakat cukup antusias hadir dalam setiap pertemuan dan memiliki inisiatif yang cukup besar dalam

mengajukan pendapat, namun mayoritas masyarakat lokal tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap wisatawan diperoleh bahwa masyarakat Desa Ujung Pandaran termasuk dalam masyarakat sadar wisata. Hal ini terlihat dari sikap dan perilaku masyarakat lokal yang telah mencerminkan unsur-unsur *Sapta Pesona*.

Kedua, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT) belum terwujud di Desa Ujung Pandaran. Masyarakat lokal cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan pariwisata, namun belum sepenuhnya terlibat khususnya dalam proses perencanaan. Peran masyarakat lokal sangat kecil bila dibandingkan dengan dua stakeholder lain. Hal ini disebabkan karena lemahnya akses yang dimiliki masyarakat lokal terhadap sumberdaya (resource) pariwisata dan rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, jumlah UMKM di Desa Ujung Pandaran cukup banyak dan mayoritas merupakan industri kreatif kuliner. Namun karena ketiadaan linkage antara ekonomi kreatif dan sektor pariwisata menyebabkan tidak adanya toko penjualan souvenir di lokasi obyek wisata..

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang disarankan yaitu:

1. Kawasan wisata Pantai Ujung Pandaran merupakan obyek wisata andalan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Abrasi yang melanda Pantai Ujung Pandaran sejak Tahun 2015 hingga saat ini menyebabkan jalan menuju obyek wisata menjadi rusak dan jumlah wisatawan yang berkunjung menurun drastis. Diharapkan penanganan bencana abrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa pemasangan sabuk pantai sepanjang 2.500 meter dapat segera terealisasi. Selain itu, diharapkan juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk ikut turut serta mengawasi pelaksanaan program tersebut.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi peranannya dalam pengembangan pariwisata dan memberikan peranan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, salah satunya adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah mengajak masyarakat lokal untuk mendesain model pariwisata yang akan dikembangkan di daerahnya.
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. Sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan perlu dirancang dengan baik, sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan dimasa yang akan datang, khususnya menciptakan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dan handal.
4. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pokdarwis Garda Pesisir, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, agar kinerja Pokdarwis dalam upaya mengembangkan pariwisata di Desa Ujung Pandaran menjadi lebih optimal. Perhatian khusus tersebut dapat berupa bantuan dana, pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pariwisata.
5. Untuk mengembangkan Desa Ujung Pandaran sebagai desa wisata, Pokdarwis Garda Pesisir dapat melakukan program-program promosi yang efektif secara berkesinambungan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, melakukan kerja sama dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan (bank maupun nonbank) baik milik pemerintah maupun swasta untuk menciptakan investasi baru, dan melakukan kegiatan wisata yang lebih inovatif dan bervariasi.
6. Industri kreatif yang menonjol di Desa Ujung Pandaran dan memiliki potensi untuk dikembangkan adalah usaha kuliner. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan agar selalu mendorong dan mendukung para pelaku UMKM di Desa Ujung Pandaran agar terus berinovasi dan berkreasi, salah satunya adalah melalui pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif.
7. Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata membutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat lokal. Peran aktif Pemerintah Daerah dapat berupa pembiayaan operasional kegiatan kebudayaan, pemberian stimulan kepada komunitas pegiat seni dan budaya, mengadakan diskusi dengan pelaku UMKM kreatif pariwisata, dan memberi kemudahan dalam perijinan. Sedangkan peran aktif masyarakat lokal dapat ditunjukkan melalui kegiatan kepedulian terhadap kebudayaan dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal..

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah memberi kesempatan dan memfasilitasi kegiatan penelitian ini serta pihak Kecamatan Teluk Sampit dan Desa Ujung Pandaran yang selalu mendampingi di lokasi penelitian. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang telah membantu dalam pengumpulan data serta memberi masukan dan saran terkait perbaikan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, IYS. dan Pujani, LPK. 2017. Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Analisis Pariwisata Universitas Udayana* 17(1) Hal. 1-9.
- Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association* 35(4).
- Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. 2017. Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia. Jakarta.
- Cahya, AA. 2016. Membangun Kampung Hijau Bersinar (Upaya Pendampingan Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh Di Bulak Banteng Lor I Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya). Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Dewi, MHU. Fandeli, C. Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara* 3(2) Hal. 117-126.
- Iorio, M. dan Corsale, A. 2014. Community-Based Tourism And Networking: Viscri, Romania. *Journal of Sustainable Tourism* 22(2) Hal. 234-255.
- Isdarmanto. 2017. Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata. Penerbit Gerbang Media Aksara dan STIPRAM. Yogyakarta.
- Kabupaten Kotawaringin Timur. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2025.
- Karim, S. Kusuma, BJ. Amalia, N. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kepariwisata Balikpapan: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Bali* 13(3) Hal. 144-155.
- Kementerian Pariwisata. 2017. Neraca Satelit Pariwisata Nasional. Penerbit Kementerian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2014. Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kontogeorgopoulou, N. Churyen, A. Duangsaeng, V. 2013. Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership. *Journal Tourism Planning & Development* 11(1) Hal. 106-124.
- Kuswanda, W. 2019. Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah Di Kawasan AEK Nauli, Danau Toba. *Jurnal Inovasi* 16(2) Hal. 129-137.
- Lutpi, H. 2016. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Di Kecamatan Jerowaru. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi* 8(3) Hal. 1-10.
- Malik, SI. 2017. Partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi Sarjana, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Musriadi. 2019. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Taman Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Tahun 2018 (Studi Pada Desa Wisata Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM* 8(1) Hal. 27-49.
- Noviyanti, R. 2017. Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa Entrepreneurship di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 1(1) Hal. 77-99.
- Nurchayati. Ratnawati. 2016. Strategi Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Penggerak Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Semarang. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke-2 Tahun 2016.
- Rahayu, S. Dewi, U. Fitriana, KN. 2016. Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora UNY* 21(1) Hal. 1-13.
- Satria, D. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics* 3(1) Hal. 37-47.

Shahraki, AA. 2018. Economic Development with Creative Tourism Reflection of Iran's Facts. *Global Journal of Archaeology & Anthropology* 5(2) Hal. 1-7.

Simamora, RK. dan Sinaga, RS. 2016. Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 4(1) Hal. 79-96.

Sunaryo, B. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Suparwoko, W. 2015. Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Simposium Nasional SMA Negeri Purworejo, Jawa Tengah: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif.

Suryana. 2013. Ekonomi Kreatif, EKONOMI BARU: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang. Jakarta Salemba Empat.

Suryawan, A. 2016. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendang Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung). *Jurnal Elektronik Mahasiswa PLS* 5(6) Hal. 143-152.

Tolkach, D. dan King, B. 2015. Strengthening Community-Based Tourism In A New Resource-Based Island Nation: Why and How?. *Journal Tourism Management*. 48. Hal. 386-398.

Untari, DR. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Desa Wisata Pulesari Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.